



Pengelolaan dan penggunaan dana desa pada Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh tahun 2019-2021

Rina Malahayati¹, Isnaini²

^{1,2}Universitas Gunung Leuser Aceh

¹diarieriena@gmail.com, ²isnainisna@gmail.com

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima 15 September 2022

Disetujui 25 November 2022

Diterbitkan 25 Desember 2022

Kata kunci:

Dana desa; Pengelolaan;
Penggunaan dana; Ekonomi
desa; Pertumbuhan desa

Keywords :

Village funds; Management;
Use of funds; Village economy;
Village growth

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penggunaan dana desa dapat menurunkan angka kemiskinan desa, mendorong pertumbuhan ekonomi desa, mengurangi angka pengangguran desa, menurunkan angka putus sekolah desa, dan apakah pengelolaan dana desa berpedoman pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis survei. Pengukuran menggunakan skala Likert. Populasi penelitian ini berasal dari 27 desa yang berada di Kecamatan Babussalam, Aceh Tenggara, dan Aceh. Dengan menggunakan software SPSS, dilakukan uji validitas, uji reliabilitas, uji regresi linier berganda, uji koefisien determinasi, uji t, dan uji F dalam menganalisis data. Temuan penelitian adalah sebagai berikut: transparansi, akuntabilitas, dan efek partisipatif simultan dan parsial pada pengelolaan dana desa, serta penggunaan dana desa untuk masyarakat miskin, yang selalu dianggarkan pada tahun 2019-2021; pertumbuhan ekonomi merata; Pengangguran desa dapat diatasi dengan upaya setiap desa memberikan bantuan untuk pengembangan dan pengembangan usaha ekonomi produktif; serta menekan angka putus sekolah di desa dengan menyekolahkan anak desa untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Gunung Leuser tahun 2018-2021 di desa masing-masing.

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out whether the use of village funds reduces village poverty rates, encourages village economic growth, reduces village unemployment rates, reduces village school dropout rates, and whether village fund management is guided by the principles of transparency, accountability, and participation. This research was conducted using a survey-based quantitative approach. measurement using a Likert scale. The population of this study came from 27 villages located in Babussalam District, Southeast Aceh, and Aceh. Using SPSS software, validity tests, reliability tests, multiple linear regression tests, coefficient of determination tests, t tests, and F-tests were carried out in analyzing the data. The study's findings are as follows: transparency, accountability, and participatory simultaneous and partial effects on the management of village funds, as well as the use of village funds for the poor, which are always budgeted for in 2019-2021; economic growth is evenly distributed; village unemployment can be handled by each village's efforts to provide assistance for the development and development of productive economic enterprises; and to reduce the dropout rate in villages by sending village children to continue their education at Gunung Leuser University from 2018-2021 in each village.

PENDAHULUAN

Menurut Yuliansyah (2015), “dana desa adalah kuncuran anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan ditujukan untuk kute ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kab/kota”. Pemanfaatan anggaran guna membayar baik pengelola pemerintah dan masyarakat. Pada hakekatnya setiap kute menerima dana secara proporsional sesuai dengan bagiannya. Dana desa didistribusikan secara berurutan. Sesuai dengan keputusan pemerintah, pengelolaan dana desa merupakan komponen penting dalam tata anggaran desa.

Sesuai Permendagri No.113 Tahun 2014 mendefinisikan “pengelolaan keuangan desa sebagai setiap dan semua kegiatan yang melibatkan pelaporan, pertanggungjawaban keuangan, pelaksanaan, penatausahaan, dan perencanaan . Dalam anggaran tahunan, mulai awal bulan Januari hingga akhir bulan Desember, anggaran desa sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif” (Husein & Warandi, 2020; Mamuaya et al., 2017). Dalam pengalokasian anggaran kute khususnya di Perapat Hilir, pengelolaan keuangan desa belum dikatakan efektif dan prinsip-prinsip

pengelolaan dana masih jauh dikatakan akuntabel. Pertanggungjawaban dana tahun 2018 diubah menjadi laporan pertanggungjawaban secara manual dengan menggunakan aplikasi sistem. Hal ini menyulitkan bendahara desa dalam menjalankan tugasnya karena pihak terkait tidak mendapatkan pelatihan yang cukup sebelum dilaksanakan.

Menurut data BPS Kabupaten Aceh Tenggara (2019), memaparkan bahwa dari 27 desa tingkat Pendidikan sebagian besar kepala desa dan aparaturnya hanya berpendidikan terakhir sederajat SMA/SLTA. Walaupun demikian pemerintahan Desa harus selalu meningkatkan kinerja akuntabilitasnya dalam mengelola desa terutama dalam pengelolaan administrasi desa sesuai dengan pedoman pemerintah. Perapat Hilir salah satu kute yang mendapatkan kucuran anggaran dari pemerintah pusat guna membangun dan mengembangkan kute yang terletak di Kecamatan Babusalam Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh selama tiga tahun terakhir. Sebagaimana data pada tabel berikut.

Tabel 1 Dana Desa di Perapat Hilir

Transfer	2018	2019	2020
Dana Desa	Rp 659.485.000	Rp 934.024.000	Rp 749.183.000

Sumber: Kantor Camat Babussalam, 2021

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 “Pengalokasian anggaran desa cukup besar, dan terjadi peningkatan jumlah anggaran desa yang signifikan setiap tahunnya”. Akibatnya, kewajiban pemerintah desa dalam mengatur dana desa sangat minim, dan pemerintah pusat dituntut untuk mengawasi langsung pemanfaatan dana dari desa di daerah (Rakhmawati et al., 2021; Sugiri, 2021).

Penggunaan dan pengelolaan dana desa sering menjadi bahan kajian teoritis dan empiris. Pengelolaan dana desa telah menjadi bahan pembahasan teoritis yang luas. Yuliansyah (2015), Sujarweni (2019), Sujarweni (2015), Umami & Nurodin (2017), Simangunsong & Wicaksono (2017), Yanhar et al. (2018), Sukmawati & Nurfitriani (2019), Ngakil & Kaukab (2020), Pamungkas et al. (2020), serta Rozandi & Digdowiseiso (2021) telah melakukan penelitian tentang pengelolaan dana desa.

Menurut Yuliansyah (2015), “pengelolaan keuangan desa secara teoritis merupakan susunan terpadu yang dilakukan dengan ketertiban dan kedisiplinan anggaran”. Pada setiap tahapan, keuangan desa diatur didasari prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Menurut Yuliansyah (2015), setidaknya 70% belanja desa dipakai untuk pelaksanaan aparatur desa, membangun desa, mengembangkan masyarakat, dan pemanfaatan buat masyarakat, dengan maksimal 30% dipakai untuk pendapatan konstan dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional aparatur di desa; tunjangan, operasional BPD, dan insentif bagi warga. “Penyelenggaraan pemerintahan kute, bidang pelaksanaan pembangunan kute seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan tata ruang, bidang pengembangan masyarakat seperti pemuda dan olahraga, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, dan penanggulangan bencana diprioritaskan untuk penggunaan anggaran desa pada tahun 20 20” (Perbup Aceh Tenggara No. 30 tahun 20 20). Sesuai Perbup No. 16 Tahun 2021 Aceh Tenggara, “penggunaan dana desa tahun 20 21 yang diutamakan adalah pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan kute yang makmur, membentuk, membangun, dan meningkatkan kapasitas pengelolaan BUM Kute Bersama untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi kute, pengembangan, dan mengembangkan usaha ekonomi produktif yang dikelola BUM Kute terlebih dahulu”.

Penelitian ini diperlukan karena penggunaan dana desa yang tidak menunjukkan penurunan angka kemiskinan dan peningkatan anggaran masing-masing desa setiap tahunnya. Perlu dilakukan penelitian supaya mengetahui apakah pengelolaan dana desa berdasarkan azas transparan, akuntabel, dan partisipatif dan untuk mengetahui penggunaan dana desa apakah mengurangi tingkat kemiskinan desa, apakah pertumbuhan ekonomi warga desa meningkat, apakah mengurangi tingkat pengangguran warga desa dan apakah mengurangi angka putus sekolah warga desa.

Topik “Pengelolaan dan Penggunaan dana desa pada Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh Tahun 2019-2021” menjadi penelitian yang ingin diteliti seperti yang telah dijelaskan di atas.

METODE PENELITIAN

Data primer “(wawancara langsung dengan aparat desa dan masyarakat)” dan data sekunder “(dokumentasi dalam bentuk laporan)” digunakan dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis survei. Metode survei adalah jenis penelitian kuantitatif untuk mendapatkan data dari masa lalu atau masa sekarang tentang pendapat, keyakinan, karakteristik, dan perilaku hubungan variabel (Sugiyono, 2016). Ini juga digunakan untuk tes beberapa hipotesis dari sampel yang diambil dari populasi tertentu. Metode survei menggunakan teknik mengumpulkan data dengan observasi (wawancara atau kuesioner), dan hasil riset cenderung umum. Skala Likert pengukuran yang digunakan.

Populasi dalam riset ini sebanyak 27 desa sehingga menjadi 54 sampel di Babussalam, Aceh Tenggara, Aceh, seperti tabel berikut.

Tabel 2 Desa di Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh

No	Nama Desa	No	Nama Desa
1	Kutarih	15	Gumpang Jaya
2	Kutacane Lama	16	Terutung Pedi
3	Perapat Hilir	17	Batumbulan Baru
4	Perapat Hulu	18	Ujung Barat
5	Pulolatong	19	Pulo Peding
6	Kota Kutacane	20	Medabe
7	Muara Lawe Bulan	21	Perapat Sepakat
8	Mbarung	22	Perapat Titi Panjang
9	Pulonas	23	Pulo Sanggar
10	Batu Bulan I	24	Mbarung Datuk Saudane
11	Batu Bulan II	25	Batu Bulan Sepakat
12	Batu Bulan Asli	26	Kampung Melayu I
13	Kampung Raja	27	Alas Merancar
14	Kampung Melayu Gabungan		

Dengan menggunakan aplikasi software Statistical Product and Service Solution (SPSS), data riset selanjutnya akan dilakukan tes validitas, tes reliabilitas, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, analisis regresi linier berganda, koefisien determinasi, uji t, dan uji F.

Ketika dua atau lebih variabel independen digunakan sebagai faktor prediktor, analisis regresi linier berganda digunakan untuk membuat prediksi tentang bagaimana naik turunnya variabel dependen dapat dimanipulasi (Sugiyono, 2016). Jika b positif (+), hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat adalah searah, sedangkan jika b negatif (-), hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat adalah searah dan berlawanan. Model persamaan untuk regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon \quad (1)$$

Keterangan: Y menunjukkan pengelolaan Dana Desa yang konstan, X1 menunjukkan transparansi, X2 menunjukkan akuntabilitas, X3 menunjukkan partisipasi, dan ε menunjukkan error term.

Selain itu, Supardi (2017) mengatakan bahwa “pengujian koefisien determinasi dilakukan pada tingkat pengaruh variabel X1,2,3 pada variabel Y dalam persen dalam penyajiannya”, berikut digunakan untuk mengkuadratkan koefisien korelasi terlebih dahulu kemudian mengalikannya dengan 100 persen untuk mendapatkan persentase:

$$KD = r^2 \times 100\% \quad (2)$$

Ket : KD adalah koefisien determinasi dan r^2 adalah koefisien korelasi ganda kuadrat

Hanya uji-t dan uji-F yang akan digunakan untuk tes hipotesis pada persamaan regresi linier berganda.

Hipotesis :

H1 : Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa

H2 : Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa

H3 : Partisipatif berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil survei yang didapatkan mengenai hasil riset, dimulai dengan hasil tes valid dan reliabel, tes asumsi klasik, tes regresi linier berganda, tes koefisien determinasi, serta uji parsial (t) dan uji simultan(F). Uji asumsi klasik tidak diperlukan karena sampel berisi semua data yang diperoleh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dana desa digunakan untuk mengentaskan kemiskinan, mendorong pertumbuhan ekonomi, mengelola pengangguran, dan menekan tingginya angka putus sekolah desa dengan menggunakan transparansi, prinsip pengelolaan yang akuntabel, dan partisipatif pada Kecamatan Babussalam, Aceh Tenggara, Aceh dengan menggunakan populasi penelitian Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara. Terdapat 27 desa di Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, sehingga besar sampelnya adalah 54 orang, dengan kepala desa dan masyarakat sebagai sasaran sebaran kuesioner.

Hasil Pengujian Validitas

Tabel 1 berikut menampilkan hasil pengujian validitas variabel transparansi (X1).

Pertanyaan	Rhitung	Rtabel	Keterangan
P1	0.533	0.273	V
P2	0.795		V
P3	0.817		V
P4	0.808		V
P5	0.649		V
P6	0.806		V
P7	0.751		V
P8	0.882		V
P9	0.482		V
P10	0.347		V

Sumber : Output SPSS 16
 V = Valid

Nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ pada tabel 1 menunjukkan bahwa hasil uji validitas variabel transparansi (X1) memenuhi kriteria validitas. Karena $df = n - 2$ memiliki "probabilitas 0,05" dan nilai $df = 54 - 2 = 52$, maka nilai r_{tabel} pada $df = 52$ dengan "probabilitas 0,05" adalah 0,273. Jika koefisien validitas sembarang pertanyaan pada variabel transparansi (X1) lebih besar dari 0,273, maka dikatakan "valid".

Berdasarkan hasil uji validitas, Tabel 2 menggambarkan variabel Akuntabilitas.

Pertanyaan	Rhitung	Rtabel	Keterangan
P1	0.439	0.273	V
P2	0.664		V
P3	0.814		V
P4	0.857		V
P5	0.872		V
P6	0.775		V

Sumber : Output SPSS 16
 V = Valid

Nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ menunjukkan bahwa tes validitas untuk variabel akuntabilitas memenuhi kriteria validitas. Fakta bahwa nilai koefisien validitas lebih besar dari 0,273 menunjukkan bahwa semua pertanyaan akuntabilitas (X1) telah terpenuhi. dinyatakan valid. Selain itu, berikut adalah tes validitas untuk variabel Partisipatif (X3):

Tabel 3 Validitas Variabel Partisipatif (X3)

Pertanyaan	Rhitung	Rtabel	Keterangan
P1	0.773		V
P2	0.808		V
P3	0.884	0.273	V
P4	0.614		V
P5	0.694		V
P6	0.761		V
P7	0.468		V

Sumber : Output SPSS 16
 V = Valid

Tes validitas untuk variabel Partisipatif (X3) memenuhi kriteria validitas apabila nilai rhitung lebih besar dari rtabel, seperti terlihat pada table 3. Terbukti tiap-tiap soal memiliki nilai koefisien validitas lebih besar dari 0,273, menunjukkan bahwa setiap pertanyaan valid. Tabel 4 menampilkan tes validitas (Y) variabel Pengelolaan Dana Desa.

Tabel 4 Validitas Variabel Pengelolaan Dana Desa (Y)

Pertanyaan	Rhitung	Rtabel	Keterangan
P1	0.783		V
P2	0.866		V
P3	0.885	0.273	V
P4	0.851		V
P5	0.945		V
P6	0.885		V
P7	0.925		V
P8	0.789		V
P9	0.721		V

Sumber : Output SPSS 16
 V = Valid

Nilai rhitung > rtabel menunjukkan bahwa hasil tes validitas untuk variabel Pengelolaan Dana Desa (Y) valid untuk semua pertanyaan.

Hasil Uji Reliabilitas

Tabel di bawah ini menampilkan hasil reliabilitas yang dilakukan pada variabel transparansi (X1).

Tabel 5 Transparansi
 Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standarized Items	N of Items
.769	.922	11

Cronbach's Alpha Berdasarkan Standardized Items memiliki nilai sebesar 0,922 pada table 5 Reliability Statistics. Hal ini menunjukkan bahwa nilai 0,922 > 0,273, menunjukkan bahwa r hitung > r tabel secara keseluruhan reliabel. Uji reliabilitas variabel Akuntabilitas (X2) sebagai berikut:

Tabel 6 Akuntabilitas
 Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standarized Items	N of Items
.795	.915	7

Variabel Akuntabilitas dianggap reliabel karena nilai realibel adalah 0,915, seperti terlihat pada tabel di atas. Berdasarkan tes reliabilitas, nilai realibel untuk variabel Partisipatif (X3) adalah 0,915, menunjukkan bahwa variabel Partisipatif dianggap reliabel, seperti terlihat pada Table 7.

Tabel 7 Partisipatif
 Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standarized Items	N of Items
.782	.915	8

Table 8 menampilkan tes reliabilitas pengelolaan dana desa.

Tabel 8 Reliabilitas Variabel Pengelolaan Dana Desa
 Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standarized Items	N of Items
.792	.968	10

Kuesioner dianggap reliabel berdasarkan table 8 yang menampilkan nilai sebesar 0,968.

Hasil Tes Pengujian Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Dalam riset ini jumlah datanya adalah 54 sampel maka tidak memerlukan uji normalitas karena jumlah observasi lebih dari 30. Bila jumlah observasi kurang dari tiga puluh, maka diperlukan uji normalitas.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dipakai untuk mengetahui bagaimana keterkaitan satu variabel dengan variabel lainnya. Nilai "VIF (Variance Inflation Factor)" dapat difungsikan untuk mengetahui adtidaknya multikolinearitas. Multikolinearitas terjadi jika "VIF (Variance Inflation Factor)" lebih besar dari 10", sedangkan nonmultikolinearitas tidak terjadi ketika "nilai VIF kurang dari 10". Tabel 9 menampilkan temuan tes multikolinearitas penelitian ini pada variabel bebas:

Tabel 9 Hasil tes Multikolinearitas

Variabel	Nilai VIF	Ket
Transparansi	6.265	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Akuntabilitas	3.726	
Partisipatif	6.504	

Sumber: Output SPSS 16

Karena "VIF (Variance Inflation Factor) kurang dari 10", hasil tes variabel independen yang diselidiki (X1, X2, X3) tidak menunjukkan tanda-tanda multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Hasil tes heteroskedastisitas tidak terdapat dalam riset ini, seperti terlihat pada table 4.10 dikarenakan pengolahan data yang dilakukan.

Tabel 10 Hasil Tes Heteroskedastisitas

Model	Unstandarized Coefficients		Standarized Coefficients	t	Sig	
	B	Std. error	Beta			
1	(Constant)	-1.810	2.242			
	Transparansi	.352	.131	.346	2.692	.010
	Akuntabilitas	.400	.157	.253	2.546	.014
	Partisipatif	.506	.176	.377	2.877	.006

a. Dependent Variable : Pengelolaan Dana Desa

Seperti dapat dilihat dari table 10, semua “nilai Sig>0,05” dimana tidak mengalami heteroskedastisitas.

Hasil Pengujian Analisis Regresi Linier Berganda

Model regresi linier berganda digunakan untuk menganalisis data setelah asumsi klasik diuji. Pengaruh variabel (X) terhadap variabel (Y) dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi adalah digunakan dalam penelitian ini untuk melihat bagaimana pengaruhnya terhadap pengelolaan danadesa di Babussalam, aceh Tenggara, Provinsi Aceh antara tahun 2019 dan 2021. Tabel 11 menampilkan hasil tes “analisis regresi linier berganda”.

Tabel 11 Hasil Pengujian Analisis multiple linear regression

				Unstandarized Residual	Akuntabilitas	Partisipatif	Transparansi
Spearman's rho	Unstandarized Residual	Correlation	Coefficient	1.000	-.179	.010	-.081
		Sig. (2-tailed)			.196	.042	.561
		N		54	54	54	54
	Akuntabilitas	Correlation	Coefficient	-.179	1.000	.785**	.726**
		Sig. (2-tailed)		.196	.000	.000	.000
		N		54	54	54	54
	Partisipatif	Correlation	Coefficient	0.010	.785**	1.000	.737**
		Sig. (2-tailed)		.942	.000	.000	.000
		N		54	54	54	54
	Transparansi	Correlation	Coefficient	-.081	.726**	.737**	1.000
		Sig. (2-tailed)		.561	.000	.000	.000
		N		54	54	54	54

Berdasarkan perhitungan “analisis regresi linier berganda (*multiple linear regression*)”:

$$Y = -1,810 + 0,352X_1 + 0,400X_2 + 0,506X_3 \quad (1)$$

Dari persamaan regresi berganda sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- $\beta_0 =$ konstan = -1,810, menunjukkan bahwa variabel pengelolaan dana desa turun sebesar 1,810 satuan jika variabel independen transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dianggap konstan ($X_1, X_2, X_3 = 0$).
- $\beta_1 = 0,352$ menunjukkan bahwa variabel pengelolaan dana desa akan naik sebesar 0,352 satuan jika variabel transparansi bertambah satu satuan, selama variabel bebas lainnya tetap/konstan (X_2 dan $X_3 = 0$).
- $\beta_2 = 0,400$ maka variabel pengelolaan danadesa akan naik sebesar 0,400 satuan jika variabel Akuntabilitas bertambah satu satuan, selama variabel bebas lainnya tetap/konstan (X_1 dan $X_3 = 0$).
- $\beta_3 = 0,506$ menunjukkan bahwa variabel pengelolaan dana desa akan naik sebesar 0,506 satuan jika partisipatif (X_3) bertambah satu satuan, selama variabel bebas lainnya tetap/konstan (X_1 dan $X_2 = 0$).

Hasil Pengujian Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi sebesar 0,868 berdasarkan output SPSS menunjukkan bahwa perubahan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dapat menyumbang 86,7 persen perubahan variabel dependen pengelolaan dana desa; sisanya sebesar 14,2 persen variabel lain yang tidak termasuk dalam model riset ini.

Hasil Tes Hipotesis

a. Uji parsial (t-Test)

Uji parsial(t) dipakai untuk menguji secara langsung hubungan antarvariabel bebas dan variabel terikat untuk menentukan tingkat signifikansi. Berikut adalah rumusan hipotesis penelitian:

Ho: $b_1 = 0$, yang menunjukkan bahwa variabel bebas ($X_{1,2,3}$) tidak berpengaruh sama sekali terhadap variabel terikat (Y).

Ha: b_1 lebih besar dari 0, menunjukkan bahwa variabel bebas ($X_{1,2,3}$) berpengaruh secara langsung terhadap variabel terikat (Y).

Nilai thitung dan ttabel dibandingkan saat mengambil keputusan. Hipotesis a diterima atau Hipotesis nol ditolak jika thitung lebih besar dari ttabel. Sementara itu, Hipotesis nol diterima atau ditolak tergantung apakah thitung sama dengan t tabel.

Nilai signifikansi juga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Ho diterima atau ditolak jika “nilai (sig t) lebih besar dari a(0,05)”. Selain itu, Ho ditolak atau Haditerima jika nilai sig t lebih kecil dari a(0,05). Berdasarkan tabel 11, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Nilai thitung sebesar 2,692; ttabel sebesar 2,00856, dan tingkat sig sebesar 0,010 semuanya menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan danadesa. Nilai sig $0,010 < 0,05$ dimana Hipotesis a diterima dan Hipotesis nol di tolak.
2. Apabila nilai thitung 2.546 ttabel 2.00856 dan nilai sig 0,014 lebihkecil dari 0,05 maka Hipotesis alternatif diterima atau Hipotesis nol ditolak dan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa.
3. Apabila nilai thitung 2,877, ttabel 2,00856, dan nilai signifikan 0,006 lebih kecil 0,05 maka H a diterima atau Hipotesis nol ditolak untuk pengaruh partisipatif terhadap pengelolaan danadesa.

b. Uji SIMULTAN (F)

Uji dapat dilihat pada Tabel 12. untuk menjelaskan bagaimana hipotesis tentang pengaruh variabel transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi terhadap variabel pengelolaan danadesa (Y). Dari tabel dapat ditarik kesimpulan bahwa Hipotesis alternatif diterima dan Hipotesis nol ditolak. Nilai F hitung yaitu 109.533 menunjukkan hal tersebut. Sedangkan taraf signifikansi yang dicapai adalah $0,000 < 0,05$. Oleh karena itu dimungkinkan untuk menarik kesimpulan bahwa model regresi berganda dapat digunakan dan bahwa variabel bebas seperti partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas berpengaruh secara simultan(Bersama-sama) terhadap pengelolaan danadesa.

Tabel 12 Hasil Uji F
ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	F tabel	Sig.
1 Regression	509.268	3	169.756	109.53		.000 ^a
Residual	77.491	50	1.550	3		
Total	586.759	53				

a. Predictors : (Constant), Partisipatif, Akuntabilitas, Transparansi

b. Dependent Variable : Pengelolaan Dana Desa

Pembahasan

PengaruhTransparansi terhadap Pengelolaan danadesa

Bila t hitung 2,692, ttabel 2,00856, dan taraf sig 0,010 menunjukkan bahwa nilai t hitunglebih besar dari ttabel, dan signifikan $0,010 < 0,05$ Ho ditolak Hipotesis alternatif diterima. Ngakil & Kaukab (2020) dan Umami & Nurodin (2017) mendukung temuan penelitian ini. Namun, temuan riset ini bertentangan dengan Sukmawati & Nurfitriani (2019). Menurut Mardiasmo (2002), “transparansimerupakan suatuketerbukaan dalam menyampaikan informasi oleh pemerintah kepada pihak yang membutuhkannya mengenai kegiatan pengelolaan sumber daya publik. Pengelolaan dana desa biasanya cenderung semakin efisien semakin tinggi tingkat transparansinya”.

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan danadesa

Apabila nilai thitung sebesar 2,546 ttabel 2,00856 dan nilai sig 0,014 lebih kecil 0,05 maka Hipotesis a diterima atau Hipotesis nol ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh sig terhadap pengelolaan dandesa. Temuan ini sejalan riset sebelumnya oleh Nagkil dan Kaukab (2020), Sukmawati & Nurfitriani (2019), serta Umami & Nurodin (2017). prinsip akuntabilitas publik memastikan bahwa pemerintah desa dapat meminta pertanggungjawaban secara terbuka kepada semua lapisan masyarakat atas setiap tindakan yang dilakukan. Akibatnya, efisiensi pengelolaan dana desa meningkat ketika kegiatan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengaruh Partisipatif Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Apabila nilai thitung 2,877, nilai ttabel 2,00856, dan nilai sig0,006 lebihkecil dari0,05 maka Ha diterima;Ho ditolak untuk pengaruh partisipatif terhadap pengelolaan danadesa. Salah satu pedoman dalam pengelolaan dana desa adalah variabel partisipatif. Efisiensi pengelolaan danadesa meningkat dengan keterlibatan masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori keagenan, bahwa partisipasi masyarakat merupakan salah satu ukuran utama kinerja agen. Istilah "partisipasi" masyarakat mengacu pada keterlibatan oleh masyarakat dalam aktivitas pemerintah dalam rangka mempengaruhi evaluasi dan pengendalian kinerja pemerintah serta pengurangan penyalahgunaan wewenang.

Penggunaan danadesa

Anggaran keuangan dari pemerintah pusat ke desa dalam terwujudnya pengentasan kemiskinan, ketimpangan sosial, dan pemerataan pembangunan disebut "danadesa". Dana tersebut berasal dari "APBN" dan disalurkan ke desa melalui kabupaten kota. APBD Tabel 4.11 menampilkan besaran anggaran/dana desa di Babussalam Aceh Tenggara, Aceh dari 2019-2021.

Sejak tahun 2019 hingga 2021, danadesa di Kecamatan Babussalam Kabupaten Tenggara mengalami kenaikan maupun penurunan. Sesuai PeraturanBupati Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2019, "prioritas penggunaan danadesa di Kecamatan Babussalam,Aceh Tenggara pada tahun 2019 adalah membiayai pemberdayaan dan pembangunan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kute".

Tabel 13 Dana Desa Dari Tahun 2019-2021

Desa	2019	2020	2021
Kota Kutacane	936,447,000	889,015,000	839,571,000
Perapat Hilir	934,024,000	749.183.000	816,638,000
Perapat Hulu	955,139,000	770,197,000	850,853,000
Muara Lawe Bulan	900,455,000	720,789,000	716,709,000
Mbarung	900,948,000	716,417,000	773,845,000
Batu Mbulan Asli	898,829,000	847,170,000	735,435,000
Batu Mbulan I	901,596,000	714,530,000	680,821,000
Batu Mbulan II	866,454,000	682,540,000	652,457,000
Kampung Raja	898,082,000	713,737,000	689,693,000
Pulonas	889,901,000	702,459,000	745,597,000
Kampung Melayu Gabungan	872,997,000	697,203,000	665,266,000
Terutung Pedi	935,972,000	758,024,000	764,800,000
Kutarih	887,905,000	698,488,000	741,484,000
Gumpang Jaya	865,936,000	680,632,000	613,502,000
Pulo Latong	900,806,000	709,147,000	757,702,000
Kutacane Lama	890,241,000	703,865,000	748,230,000
Batu Mbulan Mbaru	890,770,000	706,694,000	657,244,000
Pulo Peding	894,557,000	723,447,000	688,462,000
Mendabe	888,760,000	707,045,000	676,201,000
Ujung Barat	866,122,000	679,946,000	622,408,000
Perapat titi Panjang	892,100,000	693,737,000	716,551,000
Perapat Sepakat	888,008,000	694,305,000	732,020,000
Alas Merancar	872,440,000	688,663,000	633,397,000
Batu Mbulan Sepakat	963,810,000	786,621,000	803,682,000
Pulo Sanggar	968,483,000	793,597,000	823,531,000
Melayu I	858,394,000	685,003,000	626,856,000
Mbarung Datuk Saudane	907,292,000	723,497,000	730,642,000

Sumber: Sid.Kemendesa.go.id Tahun 2021

"Penyelenggaraan pemerintahan kute, bidang pelaksanaan pembangunan kute dalam hal Pendidikan; Kesehatan; pekerjaan umum; dan penataan ruang; bidang pengembangan masyarakat seperti pemuda dan olahraga, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, dan penanggulangan bencana diprioritaskan untuk digunakan dana desa tahun 2020" dalam Perda No. 30 Tahun 20 20 untuk Daerah

Aceh Tenggara. Menurut Peraturan Bupati Aceh Tenggara No.16 Tahun 2021, “prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 adalah pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan kute tanpa kemiskinan, pembentukan, pembangunan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUM Kute Bersama untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi kute, pengembangan, dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang dikelola BUM Kute terlebih dahulu”.

Temuan penggunaan anggaran desa dianggarkan di desa-desa di Kecamatan Babussalam, Aceh Tenggara, dari tahun 2019 hingga 2021 dimaksudkan untuk mengentaskan kemiskinan di Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara.

Berdasarkan penelitian, penggunaan dana desa untuk pertumbuhan ekonomi desa hanya bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Kute dalam persentase yang merata. Dalam rangka mengelola pengangguran desa, setiap desa memiliki jenis usaha yang memberikan bantuan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diprioritaskan untuk dikelola oleh BUM Kute.

Penggunaan dana desa untuk menekan angka putus sekolah di desa-desa di Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara memberikan dampak yang cukup signifikan. Mulai tahun 2018 hingga 2021, setiap desa akan mengirimkan generasi muda ke Universitas Gunung Leuser untuk melanjutkan pendidikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa transparansi, akuntabilitas, partisipatif terhadap pengelolaan dana desa berpengaruh signifikan. Transparansi, akuntabilitas dan partisipatif berpengaruh simultan (Bersama-sama) terhadap pengelolaan dana desa. Anggaran penggunaan dana desa di desa-desa di Kecamatan Babussalam, Aceh Tenggara mulai tahun 2019 hingga tahun 2021 ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan di Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara. Penggunaan dana desa untuk pertumbuhan ekonomi warga desa berdasarkan penelitian hanya ingin mewujudkan pertumbuhan ekonomi kute yang persentase yang merata dan untuk pengangguran desa dapat tertangani ada bentuk usaha masing-masing desa memberi bantuan untuk pembangunan dan tumbuhnya usaha ekonomi yang menguntungkan, yang akan diprioritaskan dan diawasi oleh BUM Kute. Penggunaan dana desa untuk menekan angka putus sekolah di desa-desa di Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara memberikan dampak yang cukup signifikan. Mulai tahun 2018 hingga 2021, setiap desa akan mengirimkan generasi muda ke Universitas Gunung Leuser untuk melanjutkan pendidikan.

Dana yang diatur oleh aparat desa harus tepat guna agar tidak ada kecurigaan sesama masyarakat kute dimana transparansi harus terbuka secara langsung dalam melaksanakan musyawarah desa, akuntabel harus secara “terstruktur” dan “sistematis”, dan “partisipatif” harus memberdayakan masyarakat dalam proses pembangunan desa. Penggunaan dana desa harus digunakan untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran dengan cara memberi modal usaha dan membuka lahan yang hasilnya berbagi Bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Husein, H., & Warandi, S. (2020). Implementasi Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Akuntansi*, 6(2), 72–98.
- Mamuaya, J. V., Sabijono, H., & Gamaliel, H. (2017). Analisis pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 (Studi kasus di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2), 1020–1030.
- Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 92–107.
- Pamungkas, B. D., Suprianto, S., Usman, U., Sucihati, R. N., & Fitryani, V. (2020). Penggunaan dana desa pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Sumbawa. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 1(2), 96–108.
- Rakhmawati, I., Hendri, R. S., & Kartikasari, N. (2021). Kebijakan transparansi dan akuntabilitas: Mampukah mencegah penyelewengan dana desa? *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 20(1), 1–12.

- Rozandi, M., & Digdowiseiso, K. (2021). Implementasi penggunaan dana desa terhadap pembangunan (Studi kasus Desa Sengkubang Kecamatan Mempawah Hilir Provinsi Kalimantan Barat). *Populis: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 6(1), 45–60.
- Simangunsong, F., & Wicaksono, S. (2017). Evaluation of village fund management in Yapen Islands Regency Papua Province (Case study at PasirPutih Village, South Yapen District). *Journal of Social Science*, 5(9), 250–269.
- Sugiri, D. (2021). Penyaluran dan penggunaan dana desa dalam masa pandemi COVID-19. *Akbis: Media Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 5(2), 130–137.
- Sugiyono, P. (2016). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. PT. Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi panduan tata kelola keuangan desa*. Pustaka Baru Press.
- Sujarweni, V. W. (2019). *Akuntansi BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)*. Pustaka Baru Press.
- Sukmawati, F., & Nurfitriani, A. (2019). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal Dan Umkm*, 2(1), 52–66.
- Umami, R., & Nurodin, I. (2017). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*, 6(11), 74–80.
- Yanhar, J., Sumaryana, A., Rusli, B., & Buchari, R. A. (2018). Analisis dampak pengelolaan dan penggunaan dana desa terhadap pembangunan daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA*, 6(1), 14–24.
- Yuliansyah, R. (2015). *Akuntansi desa*. Salemba Empat.